

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DAERAH (STUDI: BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Strata-2
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

AYU WIDYATAMA PERMATASARI

NBI : 1162300013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DAERAH (STUDI: BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Magister Strata-2

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

AYU WIDYATAMA PERMATASARI

NBI : 1162300013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

TANDA PENGESAHAN TESIS
TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 11 JANUARI 2025:

Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS
NPP. 20110.86.0062

Dr. Achjuddin Ibnu Rochim, SH., M.Si
NPP. 20110.96.0463

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui;
Dekan

Mengesahkan;
Kaprodik

Dra. Ayu Maduwinarti, MP
NIP. 20120.87.0103

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS
NPP. 20120.90.0203

LEMBAR PENETAPAN TESIS

**TESIS INI TELAH DITETAPKAN PANITIA PENGUJI TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

PADA TANGGAL 11 JANUARI 2025

Panitia Penguji

**1 Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS
NPP. 20110.86.0062**

**2 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP
NIP. 20120.87.0103**

**3 Dr. Joko Widodo, MS
NPP. 20110.93.0306**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS
NPP. 20120.90.0203**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Widyatama Permatasari
NIM : 1162300013
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi: Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah (Tesis) yang saya buat merupakan benar-benar karya ilmiah saya sendiri melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing, bukan hasil plagiat dari karya ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan dan/atau karya ilmiah orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik tertentu.
2. Bahwa jika saya mengambil, mengutip atau menulis sebagian dari karya ilmiah orang lain tersebut akan mencantumkan sumber pada daftar pustaka.
3. Apabila kemudian hari ternyata tesis saya terbukti sebagian atau seluruhnya sebagai plagiat dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya serta tidak mencantumkan dalam daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi berat pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan atas kesadaran saya yang sesadar-sadarnya.

Surabaya, Januari 2025


Ayu Widyatama Permatasari




PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email: perpus@untag-sbv.ac.id

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Widyatama Permatasari

NPM : 1162300013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

(STUDI : BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Yang Menyatakan,

Ayu Widyatama Permatasari

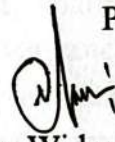
1162300013

10. Seluruh civitas akademika Prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu penulis dalam mengikuti aktivitas perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan MAP 57 Prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Demikian penulis sampaikan, adapun dalam hal ini penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akhir kata penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak dapat berguna dalam menyempurnakan tesis ini.

Surabaya, Januari 2025

Penulis,



Ayu Widyatama Permatasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta diskusi dari berbagai pihak, sehingga membantu kelancaran penyusunan tesis ini. Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M. CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Harjo Seputro, S.T., M.T., Wakil Rektor I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dr. Abdul Halik, M.M., Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M. selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing proses penyusunan tesis ini.
6. Kepada Gesa Wirangga Putra, yang selalu setia mendampingi saya dalam setiap proses perjalanan ini, memberikan cinta dan pengertian yang tidak pernah habis. Terima kasih karena selalu meyakinkan bahwa saya mampu
7. Kepada putri pertama saya Nala Widhiani Prastista, Terima kasih untuk segala pengertiannya dan bahagia yang selalu diberikan.
8. Keluarga yang selalu memberikan support dan motivasi dalam penyelesaian studi ini.
9. Seluruh Pegawai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah membantu memfasilitasi aksesibilitas data penelitian dalam tesis ini.
10. Seluruh civitas akademika Prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu penulis dalam mengikuti aktivitas perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan MAP 57 Prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Demikian penulis sampaikan, adapun dalam hal ini penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akhir kata penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak dapat berguna dalam menyempurnakan tesis ini.

Surabaya, Januari 2025
Penulis,

Ayu Widyatama Permatasari

ABSTRAK

Kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) merupakan layanan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kebijakan ini juga membawa keterbukaan informasi pada publik, dimana melalui kebijakan SIPD menjamin setiap individu untuk dapat mengakses informasi pemerintahan daerah sesuai kebutuhan masyarakat secara efektif dan mudah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah berjalan dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pada sarana sistem layanan yang disediakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sering kali mengalami *trouble*. Adapun hal ini terjadi karena melonjaknya akses secara nasional yang dilakukan OPD secara nasional diwaktu tertentu pada layanan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan dan SIPD.

ABSTRACT

The local government information system (SIPD) policy is a service for managing local development information, local financial information, and other local government information in an integrated and sustainable manner. This policy also brings information disclosure to the public, where through the SIPD policy guarantees every individual to be able to access local government information according to community needs effectively and easily. This study aims to examine how the implementation of the local government information system (SIPD) policy in improving local government accountability in the General Bureau of the Regional Secretariat of East Java Province. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis and data collection obtained through interviews and research observations. The results showed that the implementation of the regional government information system (SIPD) policy at the General Bureau of the Regional Secretariat of East Java Province has been running and implemented well. However, in its implementation there are still several obstacles that hinder the implementation of the policy. The inhibiting factor found in this research is that the service system facilities provided by the Ministry of Home Affairs (Kemedagri) often experience trouble. This happens because of the surge in national access by OPDs nationally at certain times to the regional government information system (SIPD) service.

Keywords: Implementation, Policy and SIPD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENETAPAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 <i>Critical Review</i>	35
2.3 Tinjauan Konseptual	37
2.3.1 Kebijakan Publik	37
2.3.2 Implementasi Kebijakan.....	42
2.3.3 E-Government	48
2.3.4 Akuntabilitas	49
2.4 Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	51
2.5 Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Fokus Penelitian	54
3.3 Lokasi Penelitian.....	55
3.4 Sumber Data.....	55
3.4.1 Data Primer	55

3.4.2	Data Sekunder	55
3.5	Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.1	Wawancara	56
3.5.2	Observasi	56
3.5.3	Dokumentasi	57
3.6	Teknik Penentuan Informan	57
3.7	Teknik Analisis Data	58
3.8	Teknik Keabsahan Data	59
BAB IV	GAMBARAN UMUM	61
4.1	Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur	61
4.1.1	Struktur Organisasi Biro Umum	63
4.1.2	Sumber Daya Manusia Biro Umum	63
4.2	Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	64
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	66
5.1	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	66
5.1.1	Dimensi Komunikasi	67
5.1.2	Dimensi Sumber Daya	76
5.1.3	Dimensi Disposisi	78
5.1.4	Dimensi Struktur Organisasi	81
5.2	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Melalui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	83
5.3	Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	87
5.3.1	Faktor Penghambat	87
5.3.2	Faktor Pendorong	88
BAB VI	PENUTUP	91
6.1	Kesimpulan	91
6.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bagi <i>Stakeholder</i>	4
Tabel 2. 1	Studi Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3. 1	Daftar Informan Penelitian.	57
Tabel 4. 1	Status dan Jumlah Sumber Daya Manusia Pada Biro Umum	63
Tabel 5. 1	Daftar Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi sebagai bentuk Konsistensi Biro Umum dalam Pelaksanaan kebijakan SIPD	73
Tabel 5. 2	Sumber Daya Pelaksana (Operator SIPD) Biro Umum.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pelaksanaan SPBE Nasional Tahun 2018- 2023.	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Biro Umum	63
Gambar 4. 2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	64
Gambar 4. 3 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	65
Gambar 5. 1 Sosialisasi Percepatan Implementasi SIPD RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	69
Gambar 5. 2 Sosialisasi Kebijakan SIPD-RI	70
Gambar 5. 3 Kegiatan Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	74
Gambar 5. 4 Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2024.....	74
Gambar 5. 5 Kegiatan Rapat dan Kordinasi Biro Umum sebagai wujud Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan SIPD	75
Gambar 5. 6 Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan SIPD (Biro Umum)	75
Gambar 5. 7 Sosialisasi Percepatan Implementasi SIPD RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	80
Gambar 5. 8 Rapat Kordinasi <i>Troubleshooting</i> Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI di Wilayah Jawa Timur.	81
Gambar 5. 9 Struktur Organisasi Biro Umum Sekda Jatim	82
Gambar 5. 10 <i>Standart Operatyng System</i> (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sistem infromasi pemerintahan daerah (SIPD).....	83
Gambar 5. 11 Manual Book SIPD untuk Masyarakat dan Lembaga	86